



DINAS TENAGA KERJA KOTA BATAM

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2024

LKjIP merupakan dokumen pelaporan wajib yang berfungsi sebagai indikator akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan Anggaran.

<https://disnaker.batam.go.id>

Jl. Raja Haji no. 1 Sekupang-Sungai Harapan

Daftar Isi

Daftar Isi	i
Kata Pengantar	ii
Ringkasan Eksekutif	v
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud Dan Tujuan	2
1.3 Dasar Hukum	3
1.4 Data Umum Organisasi	4
1.4.1 Struktur Organisasi	5
Tabel 1.1	5
Bagan Struktur Organisasi	5
1.4.2 Tugas Pokok Dan Fungsi	5
1.4.3 Sumber Daya Manusia	6
Tabel 1.2	6
SDM Menurut Golongan	6
Tabel 1.3	6
SDM Menurut Pendidikan	6
Tabel 1.4	7
SDM Menurut Penempatan	7
1.5 Sistematika Penyajian	7
Bab II	8
PERENCANAAN KINERJA	8
2.1 Rencana Strategis	8
2.2 Pernyataan Visi dan Misi	9
2.3 Tujuan dan Sasaran Strategis	11
2.4 Program Kerja	13
2.5 Indikator Kinerja Utama	13
Tabel 2.2	14
Indikator Kinerja Utama	14
2.6 Rencana Kerja	14
Tabel 2.3	15

Program dan Kegiatan TA. 2024.....	15
2.7 Perjanjian Kinerja.....	16
Tabel 2.4.....	17
Perjanjian Kinerja TA. 2024	17
Bab III	19
AKUNTABILITAS KINERJA	19
3.1 Capaian Kinerja Dinas Tenaga Kerja.....	25
Tabel 3.2.....	27
Tabel 3.4.....	28
3.2 Realisasi Anggaran	33
Tabel 3.6.....	34
Capaian Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2024	34
Bab IV	37
PENUTUP	37
4.1 Kesimpulan.....	37
4.2 Rekomendasi.....	37

Kata Pengantar

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat melaksanakan kegiatan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Batam Tahun 2024 dan sekaligus dapat menyelesaikan laporan pelaksanaan kegiatan yaitu Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

Penyusunan dokumen ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta memperhatikan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Tenaga Kerja Kota Batam ini merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja instansi dalam mencapai tujuan atau sasaran strategisnya yang harapannya dapat dimanfaatkan untuk:

- (1) Bahan evaluasi kinerja;
- (2) Penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;
- (3) Penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang;
- (4) Penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Laporan ini memuat capaian kinerja yang merupakan realisasi kinerja dari target-target kinerja yang diperjanjikan dalam Penetapan/ Perjanjian Kinerja dan sasaran strategis Tahun 2021-2026. Pada umumnya sasaran yang direncanakan tahun 2024 dapat direalisasikan dengan baik. Selain itu, LKjIP juga merupakan sarana evaluasi atas

pencapaian kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Batam sebagai umpan balik/ pendorong untuk meningkatkan kinerja.

Akhirnya, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan LKjIP ini. Ibarat pepatah "Nobody is Perfect" maka dari itu segala kritikan untuk perbaikan LKjIP ini sangat kami hargai. Semoga Allah S.W.T tetap membimbing dan menyadarkan kita untuk selalu berkarya lebih baik lagi sehingga Visi dan Misi Pemerintah Kota Batam khususnya pada misi ketiga Mewujudkan SDM yang Berdaya Saing, Berbudaya, Produktif dan Berakhlak Mulia yang turut didukung Dinas Tenaga Kerja Kota Batam dapat tercapai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan dapat memberikan kontribusi yang lebih baik lagi bagi pembangunan Kota Batam.

Batam, 28 Februari 2025

Kepala Dinas Tenaga Kerja
Kota Batam



Rudi Sakyakirti, SH., MH
NIP. 19650606 199303 1 018

Paraf Hierarki	
Sekdis.....	
Kasubbag 	

Ringkasan Eksekutif

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Tenaga Kerja Kota Batam ini merupakan pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Batam yang memuat rencana, capaian dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra Dinas Tenaga Kerja Kota Batam Tahun 2021-2026. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis.

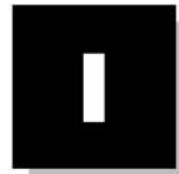
Ringkasan capaian kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Batam yang dihasilkan tahun 2024 dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Menurunnya masalah ketenagakerjaan dan berkurangnya jumlah pengangguran
 - ❖ Menurunkan tingkat pengangguran terbuka dengan indikator persentase tingkat pengangguran terbuka, realisasi sampai akhir bulan Desember 2024 adalah 7.68% menurun sebesar 1.97% dari target 9.65%, hal ini disebabkan banyaknya perusahaan yang membuka lowongan pekerjaan dan mengadakan pelatihan berbasis kompetensi.
 - ❖ Persentase penyelesaian masalah ketenagakerjaan dengan indikator meningkatnya persentase penurunan kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan, capaian kinerja sampai dengan akhir bulan Desember 2024 adalah 96% masuk kategori sangat baik.
 - ❖ Persentase pencari kerja yang bersertifikasi kompetensi, capaian kinerja sampai akhir bulan Desember 2024 adalah 100% masuk kategori sangat baik.
 - ❖ Persentase tenaga kerja yang bersertifikasi kompetensi, capaian kinerja sampai akhir bulan Desember 2024 adalah 100% masuk kategori sangat baik.

- ❖ Persentase pencari kerja yang terserap dan ditempatkan, capaian kinerja sampai dengan akhir bulan Desember 2024 adalah 100% masuk kategori sangat baik.
2. Meningkatnya Kualitas Lembaga Pelatihan dengan indikator persentase lembaga yang terakreditasi, realisasi sampai akhir bulan Desember 2024 adalah 100% tidak sesuai dengan target, dengan capaian kinerja yaitu 100% masuk kategori sangat baik.
 3. Meningkatkan ketenangan bekerja dan berusaha bagi pelaku proses produksi pekerja dengan indikator persentase pekerja / buruh yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, capaian kinerja sampai dengan akhir bulan Desember 2024 adalah 100% masuk kategori sangat baik.
 4. Meningkatkan Pembinaan dan Penegakan Hukum Ketenagakerjaan dengan indikator persentase perusahaan yang melaksanakan peraturan ketenagakerjaan, capaian kinerja sampai dengan akhir bulan Desember 2024 adalah 100% masuk kategori sangat baik, yaitu terealisasi 29.64% dari target 25%.
 5. Mengusahakan peningkatan pelayanan administrasi perkantoran dan peningkatan sarana dan prasarana
 - ❖ Persentase tersedianya pelayanan kebutuhan administrasi perkantoran, capaian kinerja sampai bulan Desember 2024 adalah 100%, termasuk kategori sangat baik.
 - ❖ Persentase tersedianya dan terpeliharanya sarana dan prasarana perkantoran, capaian kinerja sampai bulan Desember 2024 adalah 100%, termasuk kategori sangat baik.

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Tenaga Kerja Kota Batam di masa yang akan datang. Pertama masih adanya kesempatan kerja yang

tidak bisa terisi karena tidak sesuai kompetensi pencari kerja dengan kebutuhan dunia industri, kedua belum maksimalnya laporan lowongan kerja yang diterima dan masih terbatasnya kesempatan kerja disektor formal, ketiga hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini penting dipergunakan sebagai acuan bagi Dinas Tenaga Kerja Kota Batam dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.



Bab I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, maka perlu adanya pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik setiap akhir tahun anggaran. Dalam dunia birokrasi, Akuntabilitas Pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tujuan instansi yang bersangkutan.

Mengacu pada Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Dinas Tenaga Kerja Kota Batam diwajibkan menetapkan target kinerja dan melakukan pengukuran kinerja yang telah dicapai serta menyampaikan LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Tenaga Kerja Kota Batam tahun 2024 merupakan wujud Akuntabilitas dan Transparansi pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kota Batam Tahun 2021-2026 dan Rencana Kinerja Tahunan 2024 yang telah ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2024. Penyusunan LKjIP

Dinas Tenaga Kerja 2024 ini pada dasarnya merupakan kewajiban yang menjadi keharusan Instansi Pemerintah dalam memberikan penjelasan secara tertulis mengenai pertanggungjawaban terhadap Kinerja / Realisasi yang telah dilakukan selama tahun 2024. Penyusunan LKjIP Dinas Tenaga Kerja tahun 2024 ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai Akuntabilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2024.

LKjIP tahun 2024 merupakan bagian dari informasi Pengukuran Kinerja dalam melaksanakan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja tahun 2021-2026, adalah dokumen evaluasi dalam mendapatkan umpan balik peningkatan kinerja pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja, dengan berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai melalui visi, misi, tujuan dan sasaran strategis.

Target kinerja yang harus dicapai Dinas Tenaga Kerja Tahun 2024, yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan tujuan yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) tahun 2021 - 2026 dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024. Pengukuran pencapaian kinerja bertujuan untuk mendorong Instansi Pemerintah dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan efektifitas dari kebijakan dan program serta dapat menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah. Sebagai bagian dari unsur penyelenggara Pemerintah Kota Batam, Dinas Tenaga Kerja dituntut untuk dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada publik baik yang bersifat teknis maupun non teknis harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Oleh karena itu Dinas Tenaga Kerja memiliki kewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada tahun 2024.

1.2 Maksud Dan Tujuan

Maksud penyusunan LKjIP tahun 2024 Dinas Tenaga Kerja Kota Batam adalah sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Pemerintah Kota Batam khususnya pada misi ketiga yaitu Mewujudkan SDM yang Berdaya Saing, Berbudaya, Produktif dan Berakhlak Mulia yang turut didukung oleh Dinas

Tenaga Kerja Kota Batam, yang terwujud dalam tingkat keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan pada tahun 2024. Sehingga LKjIP ini dijadikan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi Organisasi.

Tujuan penyusunan LKjIP Dinas Tenaga Kerja Kota Batam Tahun 2024 adalah bertujuan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Sehingga diharapkan rekomendasi yang dihasilkan dari LKjIP ini dapat menjadi salah satu masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang agar pencapaian program dan kebijakan dapat ditingkatkan dari tahun ke tahun.

1.3 Dasar Hukum

Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Batam ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999, tentang penyelenggaraan negara bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN);
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara yang diubah dengan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2006 Tentang Peraturan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

- d. Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi republik indonesia Nomor 53 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- h. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Batam;
- i. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Sistem Kerja di Dinas Tenaga Kerja (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2023 Nomor 1143).

1.4 Data Umum Organisasi

Dinas Tenaga Kerja Kota Batam dibentuk dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Batam Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Sistem Kerja di Dinas Tenaga Kerja.

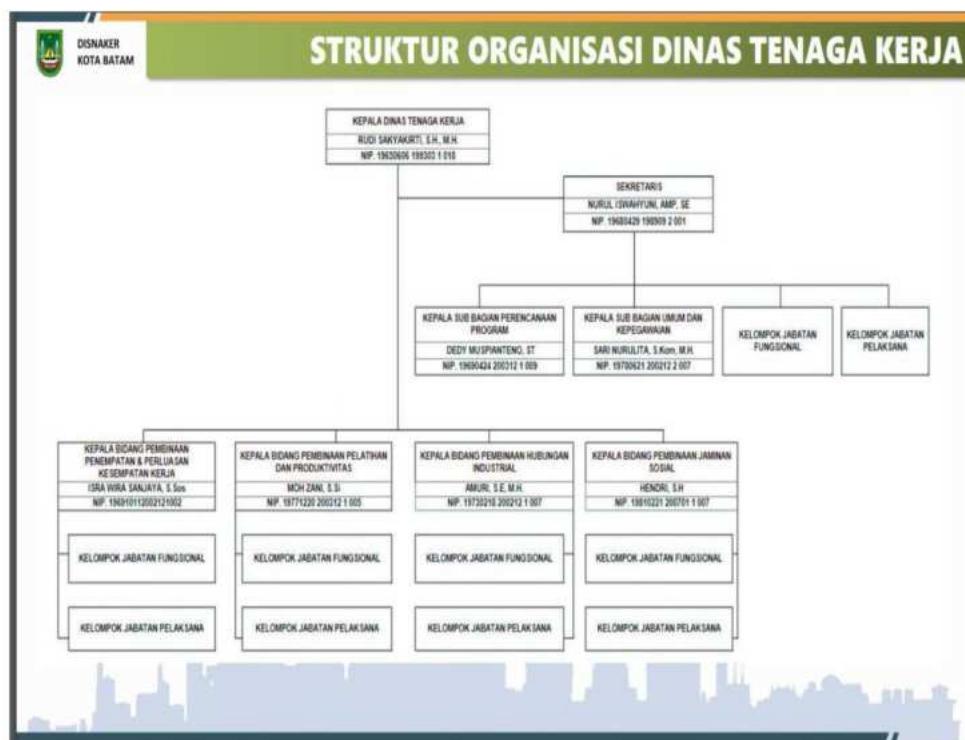
Berdasarkan Peraturan Wali Kota Batam Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas Dinas Tenaga Kerja, Dinas Tenaga Kerja Kota Batam dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah, mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggung jawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah

berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang Ketenagakerjaan sesuai dengan kewenangannya.

1.4.1 Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Dinas Tenaga Kerja Kota Batam memiliki struktur organisasi sebagai berikut:

Tabel 1.1
Bagan Struktur Organisasi



1.4.2 Tugas Pokok Dan Fungsi

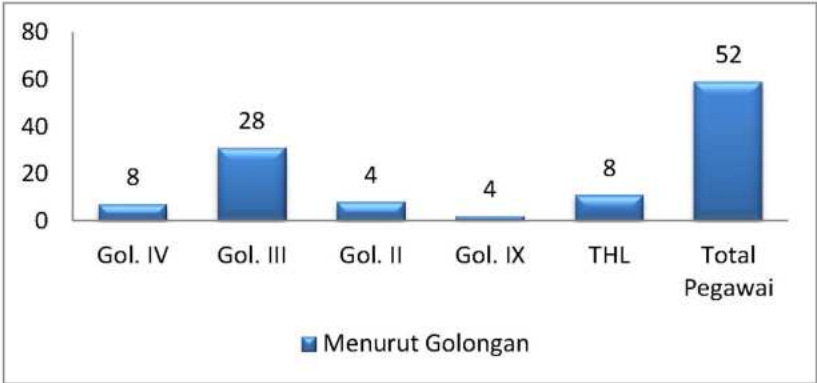
Dalam pelaksanaan tugas pokok, Kepala Dinas Tenaga Kerja mempunyai fungsi:

- Perumusan kebijakan teknis di bidang ketenagakerjaan;
- Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang ketenagakerjaan;
- Pembinaan dan pelaksanaan di bidang ketenagakerjaan; dan
- Pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan dinas.

1.4.3 Sumber Daya Manusia

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Tenaga Kerja Kota Batam didukung oleh personel / Sumber Daya Manusia sebanyak 52 (lima puluh dua) orang, terinci sebagai berikut:

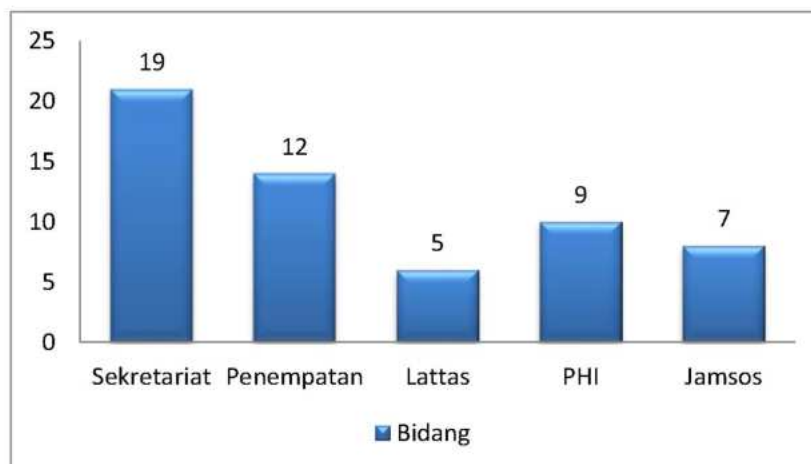
Tabel 1.2
SDM Menurut Golongan



Tabel 1.3
SDM Menurut Pendidikan



Tabel 1.4
SDM Menurut Penempatan



1.5 Sistematika Penyajian

Dalam laporan akuntabilitas ini disajikan data kegiatan maupun sumber pembiayaan yang bersifat strategis, yaitu data kegiatan pembangunan sebagaimana tercantum dalam APBD Tahun Anggaran 2024. Strategis disini dimaksudkan kegiatan yang mempunyai bobot strategis dalam kaitannya dengan pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja Kota Batam.

Laporan akuntabilitas kinerja ini terdiri dari 4 (empat) Bab dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I** : Pendahuluan, Menguraikan tentang Gambaran Umum Organisasi, Aspek Strategis Organisasi, Dan Sistematika Penyajian;
- BAB II** : Perencanaan Dan Penetapan Kinerja;
- BAB III** : Akuntabilitas Kinerja Menguraikan Tentang Pengukuran Kinerja, Evaluasi Dan Analisis Capaian Kinerja, Serta Akuntabilitas Keuangan;
- BAB IV** : Penutup Menguraikan Tentang Tinjauan Secara Umum Terhadap Kinerja Yang Telah Dicapai Termasuk Upaya Strategis Untuk Meningkatkan Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Batam Di Tahun Mendatang (Years to Years).



Bab II

PERENCANAAN KINERJA

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Rencana Strategis merupakan langkah yang harus dilakukan instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan strategi organisasi. Sebagai instansi yang mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota dalam penanganan bidang Ketenagakerjaan yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026, tujuan pembangunan bidang ketenagakerjaan dan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kota Batam Tahun 2021-2026, Dinas Tenaga Kerja Kota Batam sesuai tugas pokok dan fungsinya telah menetapkan Perencanaan Kinerja yang berorientasi hasil yang ingin dicapai dalam 5 tahun kedepan. Perencanaan tersebut meliputi visi, misi, tujuan dan sasaran serta cara pencapaian tujuan dan sasaran. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut dalam tahun 2024 telah ditetapkan rencana dan target kinerja.

2.1 Rencana Strategis

Rencana Strategis merupakan dokumen perencanaan organisasi perangkat daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan sebagai pedoman bagi penyusunan program dan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 disebutkan, bahwa Perencanaan Strategik merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 sampai dengan 5 tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau

mungkin timbul titik perencanaan strategis mengandung tujuan, sasaran strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran) yang meliputi kebijakan dan program yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

Renstra Dinas Tenaga Kerja Kota Batam merupakan dokumen perencanaan yang bersifat teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis dari RPJMD Kota Batam dalam aspek perencanaan pembangunan daerah, yang memuat strategi, kebijakan, program-program dan kegiatan indikatif Inspektorat Daerah Kota Batam selama kurun waktu lima tahun kedepan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Kota Batam.

Perumusan perencanaan strategik Dinas Tenaga Kerja Kota Batam mengikuti pola yang merupakan tahapan-tahapan kegiatan yang paling kualitatif sampai dengan yang paling teknis, kuantitatif, dan sangat rinci. Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kota Batam mencakup visi dan misi, tujuan, sasaran serta cara pencapaian tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah Kota Batam. Sasaran yang ingin dicapai dalam tahun 2024 akan dijelaskan didalam Rencana Kinerja 2024.

2.2 Pernyataan Visi dan Misi

Visi merupakan tujuan akhir dari keinginan yang dapat menggambarkan atau memberikan cita dan citra yang ingin diwujudkan dan sekaligus memotivasi dan memberi semangat yang senantiasa mewarnai pola pikir dan langkah dalam mengelola keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Dinas Tenaga Kerja Kota Batam mendukung visi dan misi Pemerintah Kota Batam periode 2021-2026. Visi Kota Batam tersebut adalah *"Terwujudnya Batam sebagai Bandar Dunia Madani yang Modern dan Sejahtera"*.

Misi merupakan suatu rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi dan harus dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan secara maksimal, yang mencerminkan pandangan organisasi tentang kemampuannya dalam mencapai visi yang telah ditetapkan.

Adapun Misi Pemerintah Kota Batam dibagi atas 5 (lima) pernyataan misi dalam rangka mewujudkan visi dimaksud, sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan melalui peningkatan kualitas dan diversifikasi kegiatan perekonomian berbasis keunikan dan keunggulan wilayah.
- 2) Mewujudkan pembangunan kota yang berkelanjutan didukung infrastruktur, utilitas dan sistem transportasi yang maju, ramah, aman, asri dan nyaman sesuai tata ruang.
- 3) Mewujudkan SDM yang berdaya saing, berbudaya, produktif dan berakhlak mulia.
- 4) Melanjutkan percepatan pembangunan di daerah hinterland untuk pemerataan dan sebagai penopang perekonomian Kota Batam.
- 5) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, responsif, efektif dan efisien berbasis teknologi informasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Dari misi tersebut dalam pelaksanaannya yang terkait dengan ketenagakerjaan adalah Misi ke – 3 yaitu :

Mewujudkan SDM yang Berdaya Saing, Berbudaya, Produktif dan Berakhlak Mulia, dengan tujuan mewujudkan pembangunan manusia yang unggul dan bertakwa menuju masyarakat yang adil dan sejahtera, dengan sasaran yaitu *Menurunnya angka pengangguran*.

Dinas Tenaga Kerja Kota Batam harus mampu menjadi motivator dan tauladan serta sebagai transformator dalam mewujudkan kebijaksanaan Wali Kota Batam serta terciptanya tenaga kerja yang berdaya saing, berbudaya, produktif dan berakhlak mulia, melalui program Pembangunan Kota Batam Tahun 2021 – 2026.

Dalam rangka menunjang pencapaian visi dan misi dan juga tercapainya prioritas program kerja Wali Kota yaitu Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi dan Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat, Dinas Tenaga Kerja Kota Batam berupaya menuangkan dalam

program, kegiatan dan sub kegiatan. Adapun dukungan program tersebut yaitu Pelatihan Kerja & Produktivitas Tenaga Kerja dan Program Penempatan Kerja yang diperkuat dengan Program Hubungan Industrial demi terciptanya ketenangan berusaha. Diharapkan melalui dukungan program ini dapat meningkatkan penyerapan Tenaga Kerja di Kota Batam demi pengurangan tingkat pengangguran dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2.3 Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan merupakan target kualitatif organisasi, sehingga pencapaian target ini dapat merupakan ukuran kinerja faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi. Tujuan sifatnya lebih konkrit daripada misi dan mengarah pada suatu titik terang pencapaian hasil. Dengan adanya pernyataan tujuan, maka akan lebih jelas bagi organisasi mengenai arah yang akan dituju dalam rangka mempertahankan eksistensi dimasa datang. Dengan demikian, tujuan merupakan penjabaran secara lebih nyata dari perumusan visi dan misi yang unik dan idealistik berdasarkan atas visi dan misi yang telah dijelaskan sebelumnya.

Tujuan merupakan kondisi yang ingin diwujudkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Batam pada 5 (lima) tahun mendatang, dimana tujuan tersebut selaras dengan Visi dan Misi Pemerintah Kota Batam, dan Sasaran Strategis Kementerian Tenaga Kerja yaitu :

- Meningkatnya penyerapan tenaga kerja di Kota Batam.

Berdasarkan perumusan tujuan strategis diatas, maka dirumuskan sasaran strategis searah dengan tujuan strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi. Perumusan sasaran strategis yang mengacu pada tujuan strategis dapat dirinci sebagai berikut:

- 1) Menurunnya masalah ketenagakerjaan dan berkurangnya jumlah pengangguran
- 2) Optimalnya kualitas layanan pendukung penyelenggaraan urusan Perangkat Daerah.
- 3) Meningkatnya ketepatan pengelolaan anggaran yang optimal.

Tabel 2.1
Sasaran Strategis Jangka Menengah

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR/ TUJUAN SASARAN	TARGET KINERJA/SASARAN PADA TAHUN					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatkan penyerapan tenaga kerja di Kota Batam	Menurunnya masalah ketenagakerjaan dan berkurangnya jumlah pengangguran	Tingkat pengangguran terbuka	10.50%	10%	9.75%	9.65%	9.60%	9.55%
		Persentase Penurunan jumlah pengangguran	10.50%	10%	9.75%	9.65%	9.60%	9.55%
		Persentase penyelesaian masalah ketenagakerjaan	96%	97%	97%	98%	98%	99%
		Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	9.89%	15.12%	16.38%	18.32%	19.59%	20.77%
		Persentase Pencari kerja yang terserap dan ditempatkan	-	50%	51%	52%	53%	54%
		Persentase data dan Informasi Perencanaan Tenaga Kerja yang disajikan dalam buku	-	100%	-	-	-	-
		Persentase Tersedianya Pelayanan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Optimalnya kualitas layanan pendukung penyelenggaraan urusan Perangkat Daerah.	Persentase Tersedianya dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Realisasi Anggaran Dinas	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya ketepatan pengelolaan anggaran yang optimal	Persentase Realisasi Anggaran Dinas	100%	100%	100%	100%	100%	100%

2.4 Program Kerja

Program Kerja merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh suatu organisasi. Program Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Batam meliputi :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
Program ini dimaksudkan untuk peningkatan penyediaan sarana administrasi perkantoran guna menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, kegiatan ini bersifat rutinitas kantor.
2. Program Perencanaan Tenaga Kerja
Program ini dimaksudkan untuk peningkatan penyediaan data dan informasi Perencanaan Tenaga Kerja dalam bentuk dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro.
3. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
Program ini dimaksudkan untuk menurunkan tingkat pengangguran terbuka dan meningkatkan kualitas dan produktivitas angkatan kerja.
4. Program Penempatan Tenaga Kerja
Program ini dimaksudkan untuk meningkatnya persentase tenaga kerja yang terserap / ditempatkan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dan terciptanya perluasan kesempatan kerja.
5. Program Hubungan Industrial
Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan penyelesaian perselisihan pengusaha pekerja dan peningkatan jaminan sosial tenaga kerja

2.5 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Tenaga Kerja merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat yang diemban. IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik. IKU perlu ditetapkan oleh pimpinan Kementerian / Lembaga / Pemerintah Daerah sebagai dasar penilaian untuk setiap tingkatan organisasi.

Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Capaian Tahunan						Penanggungjawab
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Menurunnya masalah ketenagakerjaan dan berkurangnya jumlah pengangguran	Persentase Tingkat pengangguran terbuka	10.5 0%	10 %	9.75 %	9.65 %	9.60 %	9.55 %	Urusan Tenaga Kerja
		Persentase penyelesaian masalah ketenagakerjaan	96 %	97 %	97 %	98 %	98 %	99 %	Bid. Hubungan Industrial/ Bidang Pembinaan Jaminan Sosial
		Persentase Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	9.89 %	15.1 2%	16.3 8%	18.3 2%	19.5 9%	20.7 7%	Bid. Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas
		Persentase Pencari Kerja yang terserap dan ditempatkan	-	50 %	51 %	52 %	53 %	54 %	Bid. Pembinaan Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja
		Persentase data dan informasi perencanaan tenaga kerja yang disajikan dalam buku	-	100 %	-	-	-	-	Bid. Pembinaan Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja

2.6 Rencana Kerja

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Kota Batam untuk Tahun Anggaran 2023 telah melaksanakan program kegiatan dengan sumber dana dari APBD Kota Batam sebesar **Rp 35.606.981.924,-** (Tiga Puluh Lima Milyar Empat Ratus Enam Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Empat rupiah) kemudian pada PAPBD 2023 mengalami penambahan dana menjadi **Rp41.547.905.512,-** (Empat Puluh Satu Milyar Lima Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Lima Ribu Lima Ratus Dua Belas Rupiah) guna melaksanakan sasaran strategis sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Tenaga Kerja Kota Batam tahun 2021 - 2026 yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam tahun 2021 - 2026. Adapun sasaran strategis, indikator kinerja dan target yang direncanakan dalam tahun 2024 dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 2.3
Program dan Kegiatan TA. 2024

No.	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
1.	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	19.32%	28.302.514.981
1.1	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase pencari kerja yang mendapatkan pelatihan	18%	17.611.175.559
1.2	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase LPK yang terakreditasi	16.67%	258.900.000
1.3	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tenaga kerja yang disertifikasi	0.38%	10.432.439.422
2.	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang terserap /ditempatkan	52%	344.133.200
2.1	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tenaga Kerja mendapatkan layanan AKAd dan AKL, Penyuluhan, Pemberdayaan dan Tenaga Kerja disabilitas yang diberikan konsultasi	11.76%	151.675.200
2.2	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase informasi lowongan kerja yang ditindaklanjuti pencari kerja	45%	121.908.000
2.3	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan penyebarluasan informasi perlindungan CPMI dan PMI	18.29%	70.550.000
3.	Program Hubungan Industrial	Persentase penyelesaian masalah ketenagakerjaan	98%	330.443.000
3.1	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peraturan perusahaan yang disahkan dan perjanjian kerja bersama yang didaftarkan	100%	239.603.000

No.	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
3.2	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pencegahan dan penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial	98%	90.840.000
4.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyediaan penunjang urusan pemerintahan Kabupaten/Kota	100%	12.570.814.331
4.1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	10.440.402.141
4.2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	559.235.000
4.3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	100%	90.070.000
4.4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	467.219.561
4.5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	100%	1.013.887.629
TOTAL				41.547.905.512

2.7 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari rencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut

diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Dinas Tenaga Kerja Kota Batam Tahun 2024 mengacu pada dokumen Renstra Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2021 – 2026, Dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024.

Pada Bulan Januari 2024 ditetapkan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Batam telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dengan uraian pada Tabel 2.4 sebagai berikut:

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja TA. 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Menurunnya masalah ketenagakerjaan dan berkurangnya jumlah pengangguran.	Persentase tingkat pengangguran terbuka	9.65%
		Persentase penyelesaian masalah ketenagakerjaan	98%
		Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	18.32%
		Persentase Pencari kerja yang terserap dan ditempatkan	52%
		Persentase Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) yang Terakreditasi	16.67%
		Persentase Perusahaan yang melaksanakan Peraturan Ketenagakerjaan	30%
		Persentase Pekerja/ Buruh yang menjadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan	70%
2.	Optimalnya kualitas layanan pendukung penyelenggaraan urusan Perangkat Daerah.	Persentase Tersedianya Pelayanan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100%
		Persentase Tersedianya dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Perkantoran	100%
3.	Meningkatnya ketepatan pengelolaan anggaran yang optimal	Persentase Realisasi Anggaran Dinas	100%

Program penunjang untuk perjanjian kinerja Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Anggaran untuk APBD sebesar Rp. 12.599.020.218,- (dua belas milyar lima ratus sembilan puluh sembilan juta dua puluh ribu dua ratus delapan belas rupiah) dan mengalami pengurangan pada perubahan APBD menjadi sebesar Rp. 12.570.814.331 (dua belas milyar lima ratus tujuh puluh juta delapan ratus empat belas ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah).
2. Program Pelatihan Kerja dan produktivitas Tenaga Kerja
Anggaran untuk APBD sebesar Rp. 22.265.658.706,- (dua puluh dua milyar dua ratus enam puluh lima juta enam ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus enam rupiah) dan mengalami penambahan pada perubahan APBD menjadi sebesar Rp. 28.302.514.981,- (dua puluh delapan milyar tiga ratus dua juta lima ratus empat belas ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah).
3. Program Penempatan Tenaga Kerja
Anggaran untuk APBD sebesar Rp. 460.458.000,- (empat ratus enam puluh juta empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah) dan mengalami pengurangan pada perubahan APBD menjadi sebesar Rp. 344.133.200,- (tiga ratus empat puluh empat juta seratus tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah).
4. Program Hubungan Industrial
Anggaran untuk APBD sebesar Rp. 281.845.000,- dua ratus delapan puluh satu juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan mengalami penambahan pada perubahan APBD menjadi sebesar Rp. 330.443.000,- (tiga ratus tiga puluh juta empat ratus empat puluh tiga ribu rupiah).



Bab III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas merupakan perwujudan dari kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah upaya untuk meneguhkan komitmen pemerintah dalam proses penyelenggaraan negara yang baik (good governance) dan akuntabel.

LKjIP Dinas Tenaga Kerja Kota Batam disusun sebagai komitmen dan upaya untuk selalu mendukung pencapaian visi, misi dan tujuan Pemerintah Kota Batam khususnya di Bidang Ketenagakerjaan sebagai organisasi pemerintah yang akuntabel. Implementasi SAKIP atau manajemen kinerja yang baik tidak terlepas dari fungsi pengendalian yang dilakukan melalui evaluasi kinerja dengan melakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui capaian hasil sehingga dapat dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam proses pengukuran capaian hasil tentunya dibarengi dengan peninjauan terhadap proses yang dilakukan untuk mencapai hasil tersebut, yang nantinya berguna untuk melakukan berbagai perbaikan-perbaikan yang diperlukan guna penguatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja.

3.1 Capaian Kinerja Dinas Tenaga Kerja

Dinas Tenaga Kerja telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu kepada penetapan kinerja Dinas Tenaga Kerja Tahun 2023 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengukuran data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan. Pengukuran dan perbandingan kinerja dalam laporan kinerja harus cukup menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah.

Adapun hasil pengukuran kinerja yang telah dicapai Dinas Tenaga Kerja Tahun 2024 sebagaimana Tabel 3.1 berikut:

Table 3.1
Capaian Indikator Kinerja Utama
Tahun Anggaran 2024

No.	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Sumber Data
Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja di Kota Batam							
1.	Menurunnya masalah ketenagakerjaan dan berkurangnya jumlah pengangguran	Persentase tingkat pengangguran terbuka	9,65%	7,68%	125,65 %	Sangat Tinggi	BPS / Dinas Tenaga Kerja
2.		Persentase penyelesaian masalah ketenagakerjaan	98%	96%	97,96 %	Sangat Tinggi	Bidang Hubungan Industrial / Bidang Pembinaan Jaminan Sosial

No.	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Sumber Data
3.		Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	18,32 %	33,51%	183%	Sangat Tinggi	Bidang Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas
4.		Persentase tenaga kerja yang terserap dan ditempatkan	52%	52%	100%	Sangat Tinggi	Bidang Pembinaan Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja
5.		Persentase Data dan Informasi Perencanaan Tenaga Kerja yang disajikan dalam buku	100%	100%	100%	Sangat Tinggi	Bidang Pembinaan Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja

Dari tabel diatas menunjukkan pencapaian kinerja utama Dinas Tenaga Kerja tahun 2024 adalah 7.68% persen dari target yang ditetapkan yaitu 9,65% dengan hasil sangat baik. Keberhasilan pada sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja sasaran yaitu persentase tingkat pengangguran terbuka. Merilis dari angka TPT yang dikeluarkan oleh BPS Kota Batam pada bulan Agustus tahun 2024, selain itu persentase penyelesaian masalah ketenagakerjaan dari target 98% realisasi 96%, persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi target 18.32% dan realisasi 33.51%, persentase tenaga kerja yang terserap dan ditempatkan juga mengalami peningkatan dari target 52% dengan realisasi 52% pada tahun 2024 ini, serta persentase data dan informasi perencanaan tenaga kerja yang disajikan dalam buku yang telah disusun pada tahun 2022 yang lalu yaitu target 100% dan relalissi 100%.

Tabel 3.2
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Lalu

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2023		Capaian (%)	2024		Capaian (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)					
1	Menurunnya masalah ketenagakerjaan dan berkurangnya jumlah pengangguran	Persentase tingkat pengangguran terbuka	9.75%	8.14%	119,78 %	9,65 %	7,68%	125,65 %
		Persentase penyelesaian masalah ketenagakerjaan	97%	96%	98,97 %	98%	96%	97,96 %
		Persentase Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	16.38 %	25.33%	155%	18,32 %	33,51%	183%
		Persentase Pencari Kerja yang terserap dan ditempatkan	51%	51%	100%	52%	52%	100%
		Persentase data dan informasi perencanaan tenaga kerja yang disajikan dalam buku	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 3.3
Kemajuan Capaian Sasaran Strategis Tahun 2024 dengan Target Strategis Jangka Menengah

No.	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2024	Target Akhir 2026	Tingkat Kemajuan
Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja di Kota Batam					
1.	Menurunnya masalah ketenagakerjaan dan berkurangnya jumlah pengangguran	Persentase tingkat pengangguran terbuka	7,68%	9,53%	Mengalami Kemajuan
2.		Persentase penyelesaian masalah ketenagakerjaan	96%	99,00%	Mengalami Kemajuan
3.		Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	33,51%	20,77%	Mengalami Kemajuan

4.		Persentase tenaga kerja yang terserap dan ditempatkan	52%	54%	Mengalami Kemajuan
5.		Persentase Data dan Informasi Perencanaan Tenaga Kerja yang disajikan dalam buku	100%	100%	Mengalami Kemajuan

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Batam Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Capaian sasaran strategis Dinas Tenaga Kerja tahun 2024 dijelaskan sebagai berikut:

- Sasaran: Menurunnya masalah ketenagakerjaan dan berkurangnya jumlah pengangguran. Keberhasilan sasaran strategis ini diukur melalui 5 (lima) indikator kinerja sasaran yaitu :

a) Persentase tingkat pengangguran terbuka

Keberhasilan sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja sasaran yaitu persentase tingkat pengangguran terbuka. Target tahun ini adalah 9.65% dengan realisasi 7.68% tercapai dengan sangat baik yaitu 125.65% dengan kategori sangat tinggi.

b) Persentase penyelesaian masalah ketenagakerjaan

Capaian indikator kinerja ini masuk kategori baik yaitu sebesar 97.95%, dari target 98% terealisasi 96% dengan kategori sangat tinggi.. Hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target indikator ini adalah kesadaran dari pengusaha memaksimalkan proses mediasi untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial, seperti masih adanya pengusaha yang tidak datang untuk menghadiri mediasi walaupun sudah mendapatkan panggilan mediasi sebanyak tiga kali.

c) Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi

Capaian indikator kinerja sasaran ini masuk kategori sangat tinggi yaitu sebesar 183% dari target 18.32% dan realisasi 33.53%. Untuk mencapai sasaran ini didukung oleh:

Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi. Target kinerja untuk kegiatan ini ditetapkan sebesar 1661 orang jumlah pencari kerja yang dilatih dan realisasi capaian adalah sebesar 1661 orang sehingga capaiannya adalah 100%.

Kegiatan Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. Target kinerja untuk kegiatan ini ditetapkan sebesar 839 orang jumlah tenaga kerja yang dilatih dan realisasi capaian adalah sebesar 839 orang sehingga capaiannya adalah 100%.

d) Persentase pencari kerja yang terserap dan ditempatkan.

Capaian indikator persentase pencari kerja yang terserap dan ditempatkan pada tahun 2024 ini masuk kategori sangat baik yaitu 52%, dan diharapkan kedepannya melalui kegiatan yang dilaksanakan untuk memperluas informasi pasar kerja dan meningkatkan layanan antar kerja seperti pelaksanaan kegiatan Job Fair/Bursa Kerja maupun Karir Hub bisa menjadi pemicu meningkatnya lapangan pekerjaan dan meluasnya kesempatan kerja.

e) Persentase data dan informasi perencanaan tenaga kerja yang disajikan dalam buku. Capaian pada indikator persentase ini adalah 100% dimana sudah disusun pada tahun 2022 yang lalu dan nantinya diharapkan dapat dijadikan acuan dalam menyusun dan menetapkan kebijakan, strategi dan program pembangunan ketenagakerjaan di Kota Batam.

Tabel 3.4
Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi Tahun 2024

No.	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi Yang Dilakukan
Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja di Kota Batam							
1.	Menurunnya masalah ketenagakerjaan dan berkurangnya jumlah pengangguran	Persentase tingkat pengangguran terbuka	9,65%	7,68%	125,65%	Keberhasilan dari indikator ini tidak terlepas dari peran dinas tenaga kerja dalam meningkatkan mutu tenaga tenaga melalui peningkatan kompetensi dengan memberikan bimtek dan pelatihan.	Meningkatkan pelatihan bagi pencari kerja serta perluasan kesempatan kerja.
2.		Persentase penyelesaian masalah ketenagakerjaan	98%	96%	97,96%	Keberhasilan indikator ini dimana peran mediator tenaga kerja yang memberikan pelayanan dengan maksimal.	Meningkatkan peran mediator hubungan industrial dalam penyelesaian masalah ketenagakerjaan
3.		Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	18,32 %	33,51%	183%	Keberhasilan indikator ini didukung dengan anggaran yang cukup melalui dana RPTKA.	Melakukan peningkatan pelatihan/ kompetensi
4.		Persentase tenaga kerja yang terserap dan ditempatkan	52%	52%	100%	Keberhasilan indikator ini yaitu dengan meningkatkan layanan antar kerja seperti pelaksanaan kegiatan Job Fair/Bursa.	Melakukan perluasan kesempatan kerja melalui bursa kerja/job fair
5.		Persentase Data dan Informasi Perencanaan Tenaga Kerja yang disajikan dalam buku	100%	100%	100%	Teraksananya indikator ini atas koordinasi dan penyajian data yang baik.	

Tabel 3.5
Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan Tahun 2024

No.	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Menunjang / Tidak Menunjang
Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja di Kota Batam							
1.	Menurunnya masalah ketenagakerjaan dan berkurangnya jumlah pengangguran	Persentase tingkat pengangguran terbuka	125,65%				
		Persentase penyelesaian masalah ketenagakerjaan	97,96%				
				PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	183%	Menunjang
				Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase pencari kerja yang mendapatkan pelatihan	185%	
				Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	100%	
				Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase LPK yang terakreditasi	100%	

No.	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Menunjang / Tidak Menunjang
				Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang dibina	100%	
				Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tenaga kerja yang disertifikasi	76,98%	
				Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	100%	
				PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang terserap /ditempatkan	156%	Menunjang
				Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tenaga Kerja mendapatkan layanan AKAD dan AKL, Penyuluhan, Pemberdayaan dan Tenaga Kerja disabilitas yang diberikan konsultasi	150%	
				Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	150%	
				Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase informasi lowongan kerja yang ditindaklanjuti pencari kerja	100%	

No.	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Menunjang / Tidak Menunjang
				Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	250%	
				Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Cakupan penyebarluasan informasi perlindungan CPMI dan PMI	100%	
				Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah CPMI yang terlayani sesuai prosedur dalam LTSA dan PMI bermasalah yang ditangani	100%	
				PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase penyelesaian masalah ketenagakerjaan	97,96%	Menunjang
				Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peraturan perusahaan yang disahkan dan perjanjian kerja bersama yang didaftarkan	100%	

No.	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Menunjang / Tidak Menunjang
				Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	100%	
				Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pencegahan dan penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial	98%	
				Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	100%	
2.	Optimalnya kualitas layanan pendukung penyelenggaraan urusan Perangkat Daerah			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	Menunjang
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100%	

No.	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Menunjang / Tidak Menunjang
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	100%	
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	100%	
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	100%	
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	100%	
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	

No.	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Menunjang / Tidak Menunjang
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	100%	
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	100%	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan penunjang urusan pemerintahan Kabupaten/Kota	100%	
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	100%	
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	100%	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi	100%	

No.	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Menunjang / Tidak Menunjang
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	100%	
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100%	
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100%	

Secara umum berdasarkan (tabel 3.5) diatas pencapaian kinerja Dinas Tenaga Kerja Tahun 2024 telah tercapai. Capaian kinerja tahun 2024 tersebut dibandingkan dengan Perjanjian Kinerja sebagai tolak ukur keberhasilan Dinas Tenaga Kerja dimana tugas pokok dan fungsinya dalam menyelenggarakan urusan tenaga kerja.

Adapun faktor-faktor yang mendukung keberhasilan dan kegagalan capaian program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja Tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Faktor keberhasilan Dinas Tenaga Kerja Kota Batam adalah sebagai berikut:
 - Perhatian dan dukungan dari atasan/pimpinan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja;
 - Adanya anggaran sebagai penunjang pelaksanaan tugas;
 - Sarana dan prasarana serta sumberdaya yang dimiliki;
 - Adanya koordinasi yang baik di internal Dinas Tenaga Kerja.
- b. Faktor kegagalan yang dihadapi Dinas Tenaga Kerja Kota Batam:
 - Belum optimalnya perhatian atasan/pimpinan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya;
 - Dukungan kualitas/komptensi SDM yang belum optimal;
 - Masih rendahnya perhatian dari internal dinas (pihak-pihak terkait) sehingga diperlukan koordinasi yang lebih intens.

3.2 Realisasi Anggaran

Pencapaian kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Batam tahun anggaran 2024 sebagai upaya mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan dapat terwujud dengan adanya dukungan dana sebagaimana tertuang dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam sebesar Rp. 35.606.981.924,- (tiga puluh lima milyar enam ratus enam juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah) baik yang dialokasikan dalam anggaran belanja operasi maupun belanja modal.

Secara umum serapan anggaran Dinas Tenaga Kerja Tahun 2024 sudah baik, dimana dari total 13 kegiatan dan 20 sub kegiatan terdapat 19 sub kegiatan yang pencapaiannya sangat baik yaitu diatas 91%, 17 subkegiatan dengan rentang nilai 80% - 91% dan ada 3 sub kegiatan yang pencapaiannya dibawah 80%.

Dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) untuk Dinas Tenaga Kerja Kota Batam tahun anggaran 2024 yang telah dikelola seluruhnya sebesar Rp. 41.547.905.512,- (empat puluh satu milyar lima ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus lima ribu lima ratus dua belas rupiah) sedangkan realisasi sebesar Rp. 40.676.309.917,- (empat puluh milyar enam ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus sembilan ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah) atau 97.90%

Pada Tahun Anggaran 2024 Dinas Tenaga Kerja Kota Batam mendapatkan alokasi anggaran yang dikelola sebagaimana tertuang pada tabel 3.6 berikut ini.

Tabel 3.6
Capaian Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2024

No.	Program/ Kegiatan	APBD (Rp)	PAPBD (Rp)	Realisasi Anggaran	Capaian (%)
1.	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	22.265.658.706	28.302.514.981	27.954.394.450	98,77
1.1	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	12.223.917.868	17.611.175.559	17.523.042.950	99,50
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	12.223.917.868	17.611.175.559	17.523.042.950	99,50
1.2	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	432.150.000	258.900.000	197.640.000	76,34
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	432.150.000	258.900.000	197.640.000	76,34

No.	Program/ Kegiatan	APBD (Rp)	PAPBD (Rp)	Realisasi Anggaran	Capaian (%)
1.3	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	9.609.590.838	10.432.439.422	10.233.711.500	98,10
	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	9.609.590.838	10.432.439.422	10.233.711.500	98,10
2.	Program Penempatan Tenaga Kerja	460.458.000	344.133.200	270.741.000	78,67
2.1	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	150.000.000	151.675.200	145.027.000	95,62
	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	150.000.000	151.675.200	145.027.000	95,62
2.2	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	121.908.000	121.908.000	109.313.000	89,67
	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	121.908.000	121.908.000	109.313.000	89,67
2.3	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	188.550.000	70.550.000	16.401.000	23,25
	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	188.550.000	70.550.000	16.401.000	23,25
3.	Program Hubungan Industrial	281.845.000	330.443.000	289.775.000	87,69
3.1	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	190.628.000	239.603.000	228.819.000	95,50
	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	190.628.000	239.603.000	228.819.000	95,50
3.2	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	91.217.000	90.840.000	60.956.000	67,10
	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	91.217.000	90.840.000	60.956.000	67,10
4.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	12.599.020.218	12.570.814.331	12.161.399.467	96,74

No.	Program/ Kegiatan	APBD (Rp)	PAPBD (Rp)	Realisasi Anggaran	Capaian (%)
4.1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.329.676.029	10.440.402.141	10.232.999.437	98,01
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.329.676.029	10.440.402.141	10.232.999.437	98,01
4.2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	539.896.000	559.235.000	543.521.650	97,19
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.844.000	1.844.000	1.628.000	88,29
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	205.765.000	224.965.000	217.856.400	96,84
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	98.605.000	98.605.000	94.945.000	96,29
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.600.000	3.600.000	3.300.000	91,67
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	230.082.000	230.221.000	225.792.250	98,08
4.3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	230.082.000	90.070.000	82.720.000	91,84
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	230.082.000	90.070.000	82.720.000	91,84
4.4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	485.478.560	467.219.561	403.753.878	86,42
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	232.836.400	213.497.401	151.828.334	71,11
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	252.642.160	253.722.160	251.925.544	99,29
4.5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.013.887.629	1.013.887.629	898.404.502	88,61
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	178.510.000	178.510.000	171.867.100	96,28
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	70.700.000	70.700.000	69.770.000	98,68
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	764.677.629	764.677.629	656.767.402	85,89
TOTAL		35.606.981.924	41.547.905.512	40.676.309.917	97,90

Bab IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2024 merupakan pertanggungjawaban atas kinerja dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kota Batam tahun 2021 – 2026, yang berisi uraian tentang capaian indikator kinerja kegiatan, program dan sasaran yang telah dilaksanakan pada tahun 2024.

Pada umumnya, pelaksanaan kegiatan di bidang ketenagakerjaan pada tahun 2024 dapat dilaksanakan dengan baik, dimana sebagian besar capaian telah dapat tercapai sesuai target yang telah ditetapkan. Meski demikian, masih terdapat target-target dalam beberapa indikator kinerja yang belum tercapai dikarenakan adanya intervensi dari faktor-faktor eksternal maupun internal yang mempengaruhi pencapaian target.

4.2 Rekomendasi

Untuk meningkatkan kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Batam di tahun mendatang harus ditempuh berbagai upaya strategis guna mengantisipasi kendala atau hambatan yang dapat berpengaruh terhadap nilai indikator kinerja. Upaya strategis pemecahan masalah tersebut adalah:

- 1) Perlu dukungan sumber daya manusia, data dan informasi serta anggaran yang memadai agar program dan kegiatan yang dibuat benar-benar

mencapai sasaran yang diinginkan sesuai dengan Visi dan Misi yang sudah dituangkan di dalam Renstra.

- 2) Mendukung pelaksanaan kegiatan yang berpusat pada Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja yaitu menurunnya masalah ketenagakerjaan dan berkurangnya jumlah pengangguran dengan cara mempertahankan indikator yang sudah tercapai baik, meningkatkan indikator yang masih cukup, dan memperhatikan prioritas program dan kegiatan yang bisa mendukung perluasan kesempatan kerja, terciptanya lapangan pekerjaan, meningkatnya produktivitas tenaga kerja, meningkatnya kenyamanan berusaha serta perbaikan iklim investasi.
- 3) Meningkatkan pelaksanaan program dan kegiatan secara terpadu sehingga dapat menghasilkan manfaat / dampak yang lebih optimal, tepat sasaran dan tepat waktu sesuai dengan tujuan Instansi.
- 4) Melakukan evaluasi secara rutin terhadap kegiatan yang sedang dilakukan sehingga keberhasilan capaian indikator kinerja di tahun-tahun berikutnya dapat ditingkatkan sebagai upaya merealisasikan Visi dan Misi Pemerintah Kota Batam, khususnya di lingkup Ketenagakerjaan.

Batam, 28 Februari 2025

Kepala Dinas Tenaga Kerja
Kota Batam



Rudi Sakyakirti, SH., MH
NIP. 19650606 199303 1 018

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS TENAGA KERJA KOTA BATAM



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rudi Sakyakirti, SH. MH
Jabatan : Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Batam

selanjutnya disebut pihak pertama

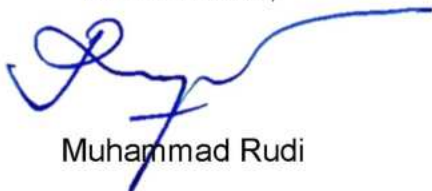
Nama : Muhammad Rudi
Jabatan : Walikota Batam

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,



Muhammad Rudi

Batam, Agustus 2024

Pihak Pertama,



Rudi Sakyakirti, SH. MH
Nip. 19650606 199303 1 018

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA DINAS TENAGA KERJA KOTA BATAM

NO.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Menurunnya masalah ketenagakerjaan dan berkurangnya jumlah pengangguran.	Persentase tingkat pengangguran terbuka	9.65%
		Persentase penyelesaian masalah ketenagakerjaan	98%
		Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	18.32%
		Persentase Pencari kerja yang terserap dan ditempatkan	52%
		Persentase Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) yang Terakreditasi	16.67%
		Persentase Perusahaan yang melaksanakan Peraturan Ketenagakerjaan	30%
		Persentase Pekerja/ Buruh yang menjadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan	70%
2.	Optimalnya kualitas layanan pendukung penyelenggaraan urusan Perangkat Daerah.	Persentase Tersedianya Pelayanan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100%
		Persentase Tersedianya dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Perkantoran	100%
3.	Meningkatnya ketepatan pengelolaan anggaran yang optimal	Persentase Realisasi Anggaran Dinas	100%

PROGRAM			ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/ Kota	Daerah	Rp. 12,570,814,331.00	PAPBD
2.	Program Perencanaan Tenaga Kerja		-	-

3.	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp. 28,302,514,961.00	PAPBD
4.	Program Penempatan Tenaga Kerja	Rp. 344,133,200.00	PAPBD
5.	Program Hubungan Industrial	Rp. 330,443,000.00	PAPBD
TOTAL		Rp. 41,547,905,512.00	PAPBD

Walikota Batam



Muhammad Rudi

Batam, Agustus 2024

Kepala Dinas Tenaga Kerja
Kota Batam



Rudi Sakyakitti, SH, MH
Nip. 19650606 199303 1 018